



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 421.102 / 1354 / 2020

TENTANG

PEMBERIAN PERUBAHAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KENDAL,

- Membaca : Surat Permohonan Perubahan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 05/KB KNG/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 beserta lampirannya yang diajukan oleh Sdr. Anis Nur Fadhillah selaku pendiri pendidikan anak usia dini KB Kenanga.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Kendal, maka perlu diberikan perubahan izin pendirian satuan pendidikan anak usia dini.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal tentang pemberian perubahan izin pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Urusan Pemerintah Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 158);
16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Tata Kerja pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten kendal Tahun 2016 Nomor 74 Seri D Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 64 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 64);

Memperhatikan	Hasil Verifikasi Kelengkapan Persyaratan Perubahan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tanggal 15 Juni 2020																														
	MEMUTUSKAN																														
Menetapkan KESATU	<p>: Memberikan perubahan izin pendirian pendidikan anak usia dini kepada :</p> <table> <tr> <td>Nama Satuan Pendidikan</td><td>:</td> <td>KB Kenanga</td> </tr> <tr> <td>Jenis Layanan</td><td>:</td> <td>Kelompok Bermain (KB)</td> </tr> <tr> <td>NPSN</td><td>:</td> <td>69922335</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td><td>:</td> <td>Jl. Resimen Kuda Putih KM 03 Desa Harjodowo Kec. Sukorejo Kab. Kendal</td> </tr> <tr> <td>Desa/Kelurahan</td><td>:</td> <td>Harjodowo</td> </tr> <tr> <td>Kecamatan</td><td>:</td> <td>Sukorejo</td> </tr> <tr> <td>Kabupaten</td><td>:</td> <td>Kendal</td> </tr> <tr> <td>Berdiri pada</td><td>:</td> <td>27 September 2013</td> </tr> <tr> <td>Pemilik/Penyelenggara</td><td>:</td> <td>TP PKK Desa Harjodowo</td> </tr> <tr> <td>Pengelola Jenis Pendidikan</td><td>:</td> <td>TP PKK Desa Harjodowo</td> </tr> </table>	Nama Satuan Pendidikan	:	KB Kenanga	Jenis Layanan	:	Kelompok Bermain (KB)	NPSN	:	69922335	Alamat	:	Jl. Resimen Kuda Putih KM 03 Desa Harjodowo Kec. Sukorejo Kab. Kendal	Desa/Kelurahan	:	Harjodowo	Kecamatan	:	Sukorejo	Kabupaten	:	Kendal	Berdiri pada	:	27 September 2013	Pemilik/Penyelenggara	:	TP PKK Desa Harjodowo	Pengelola Jenis Pendidikan	:	TP PKK Desa Harjodowo
Nama Satuan Pendidikan	:	KB Kenanga																													
Jenis Layanan	:	Kelompok Bermain (KB)																													
NPSN	:	69922335																													
Alamat	:	Jl. Resimen Kuda Putih KM 03 Desa Harjodowo Kec. Sukorejo Kab. Kendal																													
Desa/Kelurahan	:	Harjodowo																													
Kecamatan	:	Sukorejo																													
Kabupaten	:	Kendal																													
Berdiri pada	:	27 September 2013																													
Pemilik/Penyelenggara	:	TP PKK Desa Harjodowo																													
Pengelola Jenis Pendidikan	:	TP PKK Desa Harjodowo																													
KEDUA	<p>: Pemegang Izin sebagaimana diktum KESATU diwajibkan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini yang sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat; 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian; 3. Mengirim laporan kegiatan secara berkala kepada koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan kecamatan setempat; 4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan oleh Perguruan Tinggi. 																														
KETIGA	<p>: Apabila pemegang izin sebagaimana diktum KESATU melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA, maka izin pendirian ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.</p>																														
KEEMPAT	<p>: Segala sesuatu yang berkaitan dengan izin pendirian ini akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam isi Keputusan ini.</p>																														
KELIMA	<p>: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.</p>																														

Ditetapkan : Kendal
Pada tanggal : 29 Juni 2020



SALINAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kendal;
2. Camat Sukorejo;
3. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Sukorejo;
4. Pertinggal.